

REKONSTRUKSI MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN NILAI KEADILAN PANCASILA

Oleh:
Danial Syah

ABSTRAK

Ketentuan mediasi penal sebagai bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan bukan hanya belum diatur, bahkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan dinyatakan penyelesaian perkara di luar pengadilan hanya berlaku untuk penyelesaian perkara perdata. Tidak dimungkinkan penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara tegas disebutkan penyelesaian perkara/sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

Permasalahan penelitian hukum rekonstruksi mediasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup berdasarkan nilai keadilan Pancasila, dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian menggunakan data-data hukum yang bersifat sekunder, baik dalam bentuk buku, jurnal, hasil penelitian, dan bentuk karya ilmiah lain serta peraturan perundang-undangan dan kasus lingkungan. Penelitian hukum normatif dengan tujuan menemukan asas, prinsip atau doktrin hukum. Penelitian ini disebut sebagai studi dogmatik atau *doctrinal research*.

Rekonstruksi mediasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup berdasarkan nilai keadilan Pancasila, yaitu asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum lingkungan hidup diganti dengan asas *primum remedium* agar sarana hukum pidana dapat segera dipergunakan untuk menyelesaikan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan agar pemulihan dan perbaikan fungsi lingkungan hidup dapat segera dilakukan, serta rumusan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diubah menjadi: *Penyelesaian perkara di luar pengadilan berlaku terhadap perkara perdata dan perkara tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang ini*.

Dalam rangka memberi dasar hukum tersebut, maka diperlukan melakukan rekonstruksi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan pada umumnya, dan perkara tindak pidana lingkungan hidup pada khususnya. Mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan harus ditujukan bagi upaya perlindungan hukum terhadap fungsi lingkungan hidup yang didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan bahwa pembangunan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sekarang, tetapi juga pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Kata Kunci : Mediasi, Sengketa Lingkungan Hidup.

RECONSTRUCTION OF ENVIRONMENTAL DISPUTE SETTLEMENT MEDIATION BASED ON PANCASILA JUSTICE VALUE

by
Danial Syah

ABSTRACT

The provision of penal mediation as a form of settlement of cases outside the court is not only not yet regulated, even in some statutory provisions it is stated that settlement of cases outside the court only applies to settlement of civil cases. It is not possible to resolve cases of crimes outside the court, Law Number 32 Year 2009 expressly states that settlement of cases/environmental disputes outside the court does not apply to environmental crimes.

The problem of mediating reconstructive legal research on environmental dispute resolution based on the value of Pancasila justice, by using normative legal research, namely research using legal data that is secondary, both in the form of books, journals, research results, and other forms of scientific work and legislation and environmental cases. Normative legal research with the aim of discovering legal principles, principles or doctrines. This research is called dogmatic study or doctrinal research.

Mediation reconstruction of environmental disputes based on the Pancasila justice value, namely the principle of *ultimum remedium* in environmental law enforcement replaced with the principle of *primum remedium* so that criminal legal facilities can be immediately used to resolve cases of pollution and / or damage to the environment, and so that the recovery and improvement of environmental functions life can be carried out immediately, and the formulation of Article 85 paragraph (2) of Law Number 32 Year 2009 is amended to: Settlement of cases outside the court applies to civil cases and environmental crime cases as regulated in this law.

In order to provide the legal basis, it is necessary to carry out reconstruction of legislation relating to the mediation of penalties as an alternative settlement of criminal cases outside the court in general, and environmental criminal cases in particular. Mediation in the resolution of environmental disputes must be aimed at legal protection efforts on environmental functions based on the principle of sustainable development that development is not only to meet the needs of the present, but also to meet the needs of future generations.

Keywords: Mediation, Environmental Disputes